

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terletak di sepanjang garis khatulistiwa, menjadikannya sebagai wilayah beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu yang relatif stabil sepanjang tahun. Keadaan geografis dan iklim ini memberikan keuntungan tersendiri dalam pengembangan sektor pertanian tropis, di mana berbagai jenis tanaman dapat tumbuh subur. Pertanian menjadi salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam struktur perekonomian nasional. Pertanian berkontribusi besar terhadap penyediaan bahan pangan, penyerapan tenaga kerja, dan menjadi sumber mata pencaharian utama di banyak wilayah, terutama di pedesaan (Ameliyah *et al.*, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, penguatan sektor pertanian perlu terus didorong melalui berbagai pendekatan, termasuk pembinaan kelembagaan yang efektif dan berkelanjutan (Yuendini *et al.*, 2019).

Dalam upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor pertanian, pendekatan yang digunakan tidak hanya berfokus pada aspek teknis budidaya, tetapi juga menyangkut pembenahan aspek sosial dan kelembagaan. Pembangunan pertanian modern menuntut adanya sistem yang mampu mengintegrasikan para pelaku usaha tani dalam suatu kerangka kerja yang terstruktur dan berorientasi jangka panjang. Salah satu strategi penting dalam mendukung hal tersebut adalah melalui penguatan kelembagaan, yang memiliki peranan strategis dalam mengorganisasi petani dan pelaku agribisnis secara kolektif. Dengan kelembagaan

yang baik, para pelaku sektor pertanian dapat meningkatkan efisiensi, memperluas akses terhadap pasar dan informasi, serta memperkuat posisi tawar dalam rantai nilai agribisnis (Nugrahapsari, 2022).

Kelembagaan mempunyai dua arti yaitu institusi dan nilai/norma, dan merupakan sistem yang mencakup nilai dan norma. Nilai dan norma yang berlaku pada lembaga ini mengatur pimpinan lembaga tersebut. Agribisnis, di sisi lain, adalah usaha di sektor pertanian dari hulu hingga hilir, yang mencakup seluruh kegiatan termasuk produksi, penyimpanan, pemasaran dan pengolahan bahan mentah pertanian, penyediaan input, penyediaan layanan konsultasi, penelitian dan kebijakan (Handayani, 2013).

Salah satu permasalahan dalam pengelolaan sumber daya pertanian adalah tidak adanya kelembagaan pertanian yang mendukung, termasuk kelembagaan pertanian. Untuk itu perlu dikembangkan kelembagaan pertanian berdasarkan pemikiran sebagai berikut. (a) Pengembangan kelembagaan petani lebih kompleks dibandingkan pengelolaan sumber daya alam karena memerlukan faktor pendukung dan unit produksi. (b) Kegiatan pertanian mencakup rangkaian berikut: penyiapan masukan, konversi masukan menjadi produk melalui upaya tenaga kerja dan manajemen, dan konversi keluaran menjadi nilai. (c) Kegiatan pertanian memerlukan dukungan berupa kebijakan dan kelembagaan dari tingkat pusat hingga daerah. (d) Kompleksitas pertanian yang melibatkan badan usaha dan organisasi menyebabkan sulitnya mencapai kondisi optimal (Anantanyu, 2011). Menurut Akbar (2022), salah satu faktor pendukung pengembangan agribisnis hortikultura adalah pemberdayaan petani melalui pengembangan kelembagaan.

Kelembagaan petani merupakan organisasi yang dibentuk oleh para petani yang berlandaskan prinsip dari, oleh, dan untuk petani itu sendiri. Tujuan utama dari kelembagaan ini adalah untuk memperkuat posisi petani dan memperjuangkan kepentingan mereka, baik yang tergabung dalam Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Dewan Komoditas Pertanian, maupun Asosiasi Komoditas tertentu. Dalam konteks ekonomi, kelembagaan petani memiliki peran signifikan dalam mendukung pembangunan sektor pertanian, khususnya dalam kegiatan budidaya tanaman pangan seperti padi. Pada tingkat nasional, lembaga-lembaga ini berkontribusi secara aktif dalam mendorong pengembangan sektor pertanian melalui pelaksanaan berbagai program dan proyek intensifikasi untuk meningkatkan hasil produksi. Pemerintah dalam sejarahnya, juga telah meluncurkan berbagai bentuk kelembagaan yang bersifat koersif atau dibentuk secara *top-down* sebagai bagian dari strategi pembangunan pertanian. Beberapa contoh kelembagaan yang pernah diterapkan di antaranya adalah Badan Usaha Unit Desa (BUUD), Demonstrasi Massal (Demas), Padi Sentra, Bimbingan Massal (Bimas), Koperasi Unit Desa (KUD), serta program Intensifikasi Khusus (Insus) dan Supra Insus (Yanfika *et al.*, 2023).

Melaksanakan kegiatan yang teratur dan terperinci secara konsisten dalam menjalankannya, kelembagaan pertanian dapat mencukupi kebutuhan Masyarakat selama masih berkaitan dengan pertanian terutama di pedesaan. Adanya kelembagaan sangat berpengaruh dalam kehidupan komunitas petani. Kelembagaan petani sendiri termasuk dalam pranata sosial yang dapat memberikan fasilitas berupa interaksi sosial dalam suatu komunitas dan mempunyai titik strategis (*entry point*) untuk menggerakkan sistem agribisnis di suatu desa. Agar

dapat terwujud, diperlukan arahan dalam menggerakkan sumber daya manusia yang telah ada agar dapat meningkat secara profesional dan posisi kelompok tani yang dimana peran kelembagaan petani masih jauh dari yang telah diharapkan (Tedjaningsih *et al.*, 2018).

Tujuan dibentuknya kelompok tani adalah untuk mengembangkan keterampilan petani dan keluarganya sebagai pelaku pembangunan pertanian serta diharapkan dapat berperan lebih besar dalam pembangunan pertanian melalui pendekatan kelompok. Kelompok tani merupakan salah satu bentuk organisasi petani yang berfungsi sebagai media. Pendekatan kelompok dinilai lebih efisien dan dapat menjadi media proses pembelajaran dan interaksi petani, sehingga diharapkan dapat mengubah perilaku petani ke arah yang lebih baik dan berkualitas. Hal ini menjadikan kelompok tani memiliki posisi yang strategis dalam mengembangkan petani yang berkualitas. Petani yang berkualitas antara lain bercirikan kemandirian dan keuletan dalam berusaha tani (Raintung, Sambiran, dan Sumampow, 2023).

Pembangunan pertanian yang berkelanjutan menuntut adanya dukungan kelembagaan yang kuat pada petani. Dalam hal ini, Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) memiliki peran strategis sebagai wadah organisasi petani yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas akses terhadap sumber daya, serta memperkuat posisi tawar petani dalam rantai nilai komoditas pertanian. Keberadaan kelembagaan ini diharapkan mampu menjadi penghubung antara kepentingan petani dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemerintah, pelaku pasar, dan lembaga keuangan. Meskipun demikian, efektivitas dan kinerja kelembagaan tersebut masih

menghadapi berbagai tantangan di sejumlah wilayah (Djazuli dan Hidayat, 2024). Beberapa faktor penghambat yang umum dijumpai antara lain lemahnya kapasitas kepemimpinan, rendahnya tingkat partisipasi anggota, serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh kelompok (Purnaningsih *et al.*, 2025).

Program-program pembangunan semakin sulit untuk menjangkau petani kecil secara individu. Kondisi ekonomi yang ada, infrastruktur, dan kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah sering kali mendorong petani dan pekerja pertanian yang memiliki lahan terbatas ke dalam eksklusi ekonomi dan sosial. Selain terbatasnya penguasaan lahan pertanian, nilai tukar pertanian yang rendah, dan kebijakan pertanian yang tidak menguntungkan petani, petani semakin terjerumus ke dalam kemiskinan (Irawati, 2015).

Dalam implementasinya di tingkat lapangan, lembaga kelompok tani dan gabungan kelompok tani menghadapi berbagai kendala yang secara umum menghambat pencapaian tujuan kelembagaan secara optimal. Salah satu permasalahan yang kerap terjadi adalah rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam kegiatan kelompok, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program kerja (Prasetya, Istan, dan Wijaya, 2023). Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya pemahaman petani terhadap peran strategis kelembagaan atau belum tumbuhnya rasa kepemilikan terhadap kelompok yang diikuti. Kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam hal kepemimpinan dan manajemen organisasi kelompok, masih tergolong terbatas. Keterbatasan ini berdampak pada lemahnya tata kelola administrasi, pelaporan, serta pengambilan keputusan yang berbasis musyawarah. Kendala lainnya meliputi sulitnya akses terhadap sumber pendanaan dan bantuan program, lemahnya koordinasi antar

kelompok, serta kurang optimalnya peran penyuluh dalam memberikan pendampingan teknis dan kelembagaan. Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani masih memerlukan penguatan, baik dari aspek struktural, fungsional, maupun kapasitas sumber daya manusianya, agar mampu menjadi pilar kelembagaan yang efektif dalam pembangunan pertanian di pedesaan (Faqih, 2014).

Untuk menjembatani kesenjangan antara tujuan pembentukan kelembagaan petani dan realitas pelaksanaan di lapangan, diperlukan adanya mekanisme evaluasi yang bersifat partisipatif, menyeluruh, dan berkelanjutan. Evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk mengukur efektivitas kinerja kelompok tani serta sebagai dasar untuk perbaikan kebijakan pembinaan ke depan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa keberhasilan kelompok tani tidak hanya ditentukan oleh dukungan eksternal seperti program pemerintah atau bantuan teknis, tetapi juga sangat bergantung pada dinamika internal kelompok itu sendiri. Faktor-faktor seperti kepemimpinan yang adaptif, komunikasi antaranggota yang efektif, serta adanya kejelasan visi dan tujuan bersama menjadi elemen penting yang perlu dikaji dalam proses evaluasi. Selain itu, pendekatan evaluasi yang melibatkan para anggota kelompok tani sebagai subjek utama akan memberikan gambaran yang lebih akurat dan relevan mengenai kondisi faktual di lapangan, serta memungkinkan terbentuknya rasa kepemilikan dan tanggung jawab yang lebih kuat terhadap keberlanjutan kelompok (Wachidah dan Wulandari, 2014).

evaluasi yang komprehensif terhadap kelompok tani dan gabungan kelompok tani juga harus mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Dinamika masyarakat pedesaan, seperti pola komunikasi

yang bersifat informal, hubungan kekerabatan yang kuat, serta tingkat pendidikan dan pengalaman bertani yang beragam, turut memengaruhi pola partisipasi dan efektivitas kelembagaan petani. Oleh karena itu, pendekatan evaluasi tidak dapat dilakukan secara seragam, melainkan harus disesuaikan dengan karakteristik lokal yang spesifik. Evaluasi yang sensitif terhadap konteks ini akan memberikan hasil yang lebih objektif dan bermanfaat, baik bagi pembuat kebijakan, penyuluh pertanian, maupun kelompok tani itu sendiri. Hasil evaluasi tersebut diharapkan tidak hanya menggambarkan kondisi aktual, tetapi juga mampu memberikan rekomendasi yang aplikatif dan strategis dalam upaya penguatan kapasitas kelembagaan petani di tingkat akar rumput (Budhijono *et al.*, 2022)

Desa Mentaras, Dukun, Gresik memiliki 12 kelompok tani yang terhitung dari setiap kelompok memiliki sekitar 15 sampai 20 anggota. Sejak awal pembentukan kelompok tani terus menerus mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan kemandirian petani. Meskipun pembinaan tersebut telah berlangsung secara berkelanjutan, akan tetapi belum dilakukannya evaluasi yang sistematis untuk menilai sejauh mana efektivitas dan dampak dari pembinaan tersebut. Khususnya belum dilakukan penilaian berdasarkan perspektif dan pengalaman langsung dari para anggota kelompok tani itu sendiri. Bahwa evaluasi semacam ini penting untuk mengetahui sejauh mana pembinaan yang dilakukan mampu memenuhi kebutuhan dan harapan anggota, serta untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki dalam proses pembinaan kelembagaan petani ke depan. Berdasarkan uraian tersebut diperlukannya evaluasi terhadap kinerja kelompok tani dan gabungan kelompok tani guna mengetahui hasil

pembinaan kelembagaan kelompok tani dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana dan prasarana yang menaungi para petani dalam mengembangkan kemampuan dari para petani dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat atau mendukung kinerjanya.

1.2 Rumusan Masalah

Kelembagaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang semakin maju dan berkembang di desa Mentaras, Dukun, Gresik namun tidak adanya evaluasi hasil dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tani dan gabungan kelompok tani sehingga progres dan pengembangan dari setiap kegiatan tidak diketahui oleh perangkat desa.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana hasil pembinaan yang dilakukan oleh kelembagaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani sebagai kelas belajar, wahana kerja sama, dan unit produksi di desa Mentaras, Dukun, Gresik?
2. Faktor apa saja yang berhubungan dengan efektivitas kelembagaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani di desa Mentaras, Dukun, Gresik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis hasil pembinaan kelembagaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani dalam menjalankan fungsinya sebagai kelas

belajar, wahana kerja sama, dan unit produksi di desa Mentaras, Dukun, Gresik.

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan terhadap tingkat efektivitas kelembagaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani di desa Mentaras, Dukun, Gresik.

1.4 Manfaat penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak pihak terkait, antara lain:

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Mahasiswa mampu membandingkan teori-teori yang selama ini dipelajari di bangku perkuliahan untuk dibandingkan dengan kondisi sebenarnya yang ada di lapangan.
 - b. Mahasiswa mampu dalam menerapkan berbagai metode atau ilmu yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan dan melatih dalam menganalisis suatu permasalahan yang ada serta mencari solusi maupun penyelesaiannya.
2. Bagi Kelompok Tani
 - a. Sebagai evaluasi kegiatan mana yang harus ditingkatkan dan harus dipertahankan.
 - b. Penelitian ini dapat memberikan saran serta masukan jika ada permasalahan pengambilan Keputusan pada kelembagaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani.
3. Bagi Perguruan Tinggi

- a. Sebagai salah satu bahan mengevaluasi pencapaian kompetensi lulusan dan materi ajar yang digunakan, serta perguruan tinggi dapat memperoleh informasi maupun sumber literatur pada bidang kajian yang serupa di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
- b. Sebagai bentuk referensi dan literatur yang dapat dijadikan pendaharaan ilmu dan pengetahuan bagi civitas akademika Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.